

## **POLA HULU DAN HILIR: MENEROPONG DINAMIKA EKONOMI-PERDAGANGAN DUNIA MELAYU ABAD KE XVII DAN XVIII**

**Ihsan Sanusi**

Institut Agama Islam Negeri Batusangkar

*Email: [ihsan\\_nusi@yahoo.com](mailto:ihsan_nusi@yahoo.com)*

### Abstract

After the Portuguese were defeated by the Dutch, Islam became stronger as the religion of Malay Nusantara society. This is marked by the emergence of Palembang Sultanate. Palembang has been trading in Malacca, and trading and buying large quantities with Pahang. In terms of power, the Sultanate of Palembang applied different powers between upstream and downstream. In the upper reaches, the sultan and the royal authorities do not have the authority to levy taxes and recruit workers. In contrast to the upstream, downstream sultans and royal authorities have the authority to levy taxes and recruit workers. They also have a special kind of privilege, especially with regard to the right to control the results of trade. Trade orientation as part of the economic system, more visible to downstream communities.

Downstream communities have long been tied to the world of commerce, can be traced since the kingdom of Srivijaya. The rivers in Palembang in addition to functioning as a means of connecting between upstream and downstream, as well as the source of basic life for the local community. The river actually contributes to shaping the mindset and "world view".

Keywords: Upstream-Downstream, Economy-Trade, Malay

### *Abstrak*

*Pasca Portugis kalah dengan Belanda, Islam semakin kokoh sebagai agama masyarakat Melayu Nusantara. Hal ini ditandai dengan munculnya Kesultanan Palembang. Palembang telah melakukan perdagangan di Malaka, dan melakukan jual beli dengan jumlah besar dengan Pahang. Dalam hal kekuasaan, Kesultanan Palembang menerapkan kekuasaan yang berbeda antara hulu dan hilir. Di kawasan hulu, sultan dan pembesar kerajaan tidak memiliki otoritas memungut pajak dan merekrut pekerja. Berbeda dengan hulu, di kawasan hilir sultan dan pembesar kerajaan mempunyai otoritas memungut pajak dan merekrut pekerja. Mereka juga mempunyai semacam privilege khusus, terutama terkait hak menguasai hasil-hasil perdagangan. Orientasi perdagangan sebagai bagian sistem ekonomi, lebih terlihat pada masyarakat di kawasan hilir.*

*Masyarakat hilir sudah lama terikat dengan dunia perdagangan, bisa ditelusuri sejak kerajaan Sriwijaya. Sungai-sungai yang ada di Palembang selain berfungsi sebagai sarana penghubung antara hulu dan hilir, juga sumber kehidupan pokok bagi masyarakat setempat. Sungai sesungguhnya turut memberikan pengaruh membentuk pola pikir dan “pandangan dunianya”.*

**Kata Kunci:** *Hulu-Hilir, Ekonomi-perdagangan, Melayu*

#### **A. Pendahuluan**

Melalui perdagangan, Dunia Melayu (Nusantara) terhubung dengan pelabuhan-pelabuhan India dan kemudian menjadi kawasan perdagangan bagi Cina, namun hingga sejauh mana pelayaran Nusantara memiliki peran penting dalam perdangan Dunia atau bahkan Asia belum pernah dikemukakan secara utuh. Perdagangan yang menghubungkan pesisir-pesisir Nusantara dengan wilayah Barat dan kemudian wilayah Utara terlihat sebagai sebuah jaringan atau memakai istilah J. C. van

Leur sebagai” ikatan emas”.<sup>1</sup> Barang-barang yang diangkut dan dibawa bersamaan dengan para pedagang dan kapal, bertemu dalam jalur perdagangan, berupa perkampungan-perkampungan dagang di Nusantara dan dikuasai oleh penguasa lokal, yaitu raja. Pedagang keliling berdesak-desakan di sekitar kawasan dagang utama, biasanya di sekitar pelabuhan-pelabuhan besar.

Dengan mempertimbangkan kehidupan sosial-ekonomi serta perdagangan (termasuk internasional), posisi para penguasa dan para raja dapat dijadikan sebagai awal utama dalam membahas dinamika ekonomi-perdagangan di dunia Melayu Nusantara. Posisi ekonomi dan politik dominan yang dimiliki para raja dan penguasa lokal termasuk kelompok-kelompok aristokrat merupakan sebuah kepastian bagi semua periode sejarah awal Melayu Nusantara. Hal ini kemudian menjadi sebuah persolan yang cukup rumit terutama pada abad ke XVII dan XVIII.

Khusus di Sumatera, ada sebuah istilah kunci yang selalu menarik disikapi sampai hari ini, yaitu istilah *hulu* dan *hilir*.<sup>2</sup> Pemahaman tentang *hulu* dan *hilir* ini juga sangat menentukan dan penting dalam memahami dinamika ekonomi perdagangan di dunia Melayu, karena bagaimanapun juga pengertian akan letak *hulu* dan *hilir* adalah alat mendasar yang memungkinkan manusia biasa untuk berorientasi dengan lingkungannya. Menurut Barbara Watson Andaya Orang Barat merasa tercengang ketika mendapati bahwasanya “orang tetap menyebut *hulu* dan *hilir* bahkan ketika tidak ada air (sungai) yang terlihat” dan bahwa “mereka menunjukkan situasi tempat-

---

<sup>1</sup> J. C. Van Leur, *Indonesia Trade and Society: Essays in Asian Social and Economic History*, Terj. Abmi Handayani, et. al., (Jogyakarta: Ombak, 2015), h. 130

<sup>2</sup> Dalam berbagai buku dan pembahasan tentang *hulu-hilir* ini ditemukan cara penulisan yang beragam, ada yang menulis *ulu-ilir*; ada juga yang menulis *uluan-iliran*. Dalam tulisan ini dipakai istilah “hulu-hilir” saja demi keseragaman.

tempat berdasarkan acuan sederhana terhadap naik atau turunnya sungai”.<sup>3</sup>

Dalam tulisan ini akan di coba menguraikan tentang dinamika ekonomi-perdagangan tersebut lebih jauh dengan titik fokus pembahasan lebih kepada dunia Melayu yang ada di Sumatera yang kental dengan pengelompokkan masyarakat hulu-hilir. Artinya, walaupun penulis mengulas tentang yang di luarnya hanya selintas dan penambah data-data yang ada.

### **B. *Hulu dan Hilir*: sebuah Konsepsi Awal tentang Pola dan Karakteristiknya**

Dalam pengertian yang lebih luas pengertian yang lebih jelas tentang hulu dan hilir ada yang menulis *ulu* dan *iliran*; *ulu-ilir*, namun dalam tulisan ini demi keseragaman hanya ditulis *hulu* dan *hilir* adalah penting karena dominasi *hilir* atas *hulu* tidak pernah dianggap sebagai sesuatu yang tidak terelakkan; orang-orang pada waktu itu selalu menekankan perbedaan identitas daerah pedalaman dengan daerah lain. Hal ini dibuktikan sebagaimana diungkapkan B. W. Andaya, oleh pernyataan seorang laki-laki rejang abad XVIII yang dengan bangganya ia menyatakan “saya bukan seorang Melayu, saya adalah seorang manusia *hulu* asli (*malayo tidah, orang ulu betul saya*).<sup>4</sup> Dengan gambaran ini sesungguhnya, di samping topografis dataran tinggi dengan tanah kering dan daerah aliran sungai, keduanya kawasan tersebut dapat dilihat dari sisi tradisi adat setempat.

Istilah *hulu* dan *hilir* pada prinsipnya beranjak dan berawal dari karakteristik lingkungan fisik. Dua istilah ini lazim digunakan dan dipakai oleh penduduk lokal membedakan kawasan dataran rendah dan dataran tinggi, serta perbedaan

---

<sup>3</sup> Barbara Watson Andaya, *To Live as Brothers: Southeast Sumatera in Seventeenth and Eighteenth Centuries*, Terj. Septian Dhaniar Rahman dan Aditya Pratama, (Yogyakarta: Ombak, 2016), h. 32

<sup>4</sup> Barbara Watson Andaya, *Ibid* .

yang merujuk kepada sosial-ekonomi dan kultur politik masing-masing kawasan, sehingga dengan pembagian pola *hulu* dan *hilir* ini akan bisa dilihat ciri khas dan hal yang melandasi. Menurut Mestika Zed,<sup>5</sup> kawasan *hulu* bisa disebut dengan wilayah *Sindang* (yang secara harfiah bermakna “perbatasan”), sedangkan kawasan *hilir* biasa disebut *Kepungutan* (berasal dari kata dasar “pungut”). Pola *hulu-hilir* ini juga bisa ditelusuri dari perjalanan sejarah panjang keduanya yang berjalan secara terpisah. Menurut Andaya,<sup>6</sup> bukti-bukti arkeologis menunjukkan bahwa bagian pedalaman Palembang maupun pedalaman Jambi dihuni oleh kelompok-kelompok masyarakat yang berkembang secara mandiri dibanding mereka yang mendiami daerah Pesisir. Salah satu ahli prasejarah menggambarkan bahwa daerah Danau Ranau dan Kerinci sudah mulai dihuni oleh suku bangsa Austronesia awal dan diolah sebagai kawasan pertanian sejak sekitar 2000 SM hingga setelahnya. Prasasti-prasasti yang berasal dari abad VII dari Palembang menyinggung tentang hubungan daerah-daerah itu dengan para pemimpin daerah pedalaman yang berkuasa. Sebagian ilmuwan menyatakan bahwa 500 SM merupakan tahun ketika monument-monumen Megalitikum yang agung mulai didirikan di Pasemah. Minimnya kosakata khas dataran tinggi di bahasa Pesisir Palembang membuat seorang ahli linguistik berkesimpulan bahwa bahasa Palembang Melayu berkembang dari dialek Melayu pada saat dialek dataran tinggi melayu sudah jelas terpisah.<sup>7</sup>

Kembali ke persoalan *hulu-hilir* ini, akan ditemukan perbedaan mencolok yang disebabkan karena dipengaruhi oleh interaksi mereka dengan dunia luar. Di sepanjang pesisir Jambi dan Palembang misalnya, kebudayaan yang umumnya ditemui adalah kebudayaan Melayu. Namun, karena kedekatan geografis

---

<sup>5</sup> Mestika Zed, *Kepialangan Politik dan Revolusi Palembang 1900-1950*, (Jakarta: LP3ES, 2003), h. 35

<sup>6</sup> Barbara Watson Andaya, *op. cit.*, h. 32-33

<sup>7</sup> Dikutid dari Bellwood, *Prehistory of the Indo-Malaysian archipelago*, lihat *Ibid.*

barangkali memfasilitasi masuknya berbagai pengaruh Jawa, dengan intensitas yang beragam. Dalam konteks ini, khusus tentang orang Jambi, barangkali menarik apa yang di katakan, Tomi Pires, bahwa “masyarakat Jambi lebih menyerupai orang Palembang dan Jawa dibandingkan orang Melayu”. Walaupun demikian, Jambi secara geografis tetap lebih dekat dengan pusat kebudayaan Melayu, yaitu Malaka dibandingkan Jawa.<sup>8</sup>

Di daerah pedalaman Jambi, salah satu kelompoknya dikenal dengan orang *Batin*<sup>9</sup> dan dianggap kelompok yang paling lama menetap. Perilaku kelompok *batin* ini mengalami perubahan yang sangat besar karena masuknya pengaruh Minangkabau, yang dimulai dari adanya pergerakan penduduk ke arah *hilir* dari dataran tinggi Minangkabau, yang memang sudah terjadi sejak dahulu. Pada akhir abad XVI, daerah-daerah *hulu* sungai Batang Hari dinyatakan sebagai *rantau* (daerah migrasi) dari orang-orang Minangkabau, tahun-tahun berikutnya semakin intensif. Selain itu, Dataran Tinggi Kerinci di bagian tengah Jambi menjadi rute tambahan bagi pergerakan *perantau* ke arah *hilir* kawasan penghasil emas yaitu Bangko yang juga terletak di pinggir sungai. Walau para *perantau* Minangkabau melangsungkan perkawinan dengan para penduduk asli, di daerah tertentu, dominasi kebudayaan dan linguistik mereka jelas terlihat hingga abad XIX. Dalam konteks inilah menurut B. W. Andaya, pengamat Barat mendeskripsikan penduduk Jambi dalam dua bagian yang luas, yaitu *batini* dan *penghulu*.

---

<sup>8</sup> Tomi Pires, *The Suma Oriental of Tome Pires An Account of The East, From The Sea to Cina and The Book of Francisco Rodrigues*, Terj. Andrian Perkasa dan Anggita Pramesti, (Yogyakarta: Ombak, 2016), h. 204

<sup>9</sup>Sebutan *batin* ini ada yang mengaitkan dengan para pemimpin orang-orang no-muslim, yang mendiami hutan dan lautan. Mengenai asal usul *batin* ini dan perubahan social komunitasnya bisa dilihat antara lain penelitian dari Rian Hidayat, “Perubahan Sosial Anak Dalam Batin Sembilan di Batin Bahar, di Kabupaten Batang Hari dan Muaro Jambi”, dalam *Proceeding The First Internasional Conference On The Jambi Studies: History, Art and Culture, Social and Religion Change*, Jambi, November 21-23, 2013, h. 473-493

*Penghulu* adalah sebutan Minangkabau yang disematkan kepada para kepala adat serta menandai bahwa dalam kelompok-kelompok itu pengaruh Minangkabau terlihat jelas.<sup>10</sup> Gambaran di Palembang jauh lebih rumit, untuk rincian lebih serius dibutuhkan kajian mendalam dan sungguh-sungguh. Namun, satu hal yang pasti bahwa dipusat dataran rendah, hubungan kebudayaan dan politik dengan Jawa tetap jauh lebih erat di bandingkan Jambi.

Dari uraian ringkas di atas, satu hal yang bisa dikatakan bahwa di Sumatera, terutama Jambi dan Palembang pada abad ke-17 dan 18 telah terlihat dengan jelas berbagai perbedaan-perbedaan, bahasa, adat kebiasaan yang kemudian mengerucut kepada pembagian pola *hulu-hilir*. *Hulu* yang dimaksud bukan saja *hulu* sungai, tetapi juga gaya hidup yang jauh berbeda dari masyarakat *hilir* atau lebih luasnya perbedaan ini bisa merujuk kepada perbedaan lingkungan fisik dan ekonomi.

### C. Dinamika Ekonomi-Perdagangan di Dunia Melayu

#### 1. Sriwijaya Basis Ekonomi-Perdagangan Dunia Melayu

Perspektif sejarah, ketika berakhir abad ke-7, Sriwijaya<sup>11</sup> telah menjadi sebuah pelabuhan dagang sebagai pusat ekonomi yang terkemuka di Nusantara. Raja-rajanya yang beribukota di Palembang dan memukimkan orang-orang Jambi, mewarisi komunikasi laut di Pantai yang paling aktif ketika itu.<sup>12</sup> Pada pertengahan abad ke-7 terdapat kesempatan yang sangat menguntungkan bagi perdagangan Nusantara bagian Barat. Ini terjadi karena permintaan hasil bumi Nusantara waktu itu

---

<sup>10</sup> Barbara Watson Andaya, *op. cit.*, h. 33

<sup>11</sup> Untuk mengetahui tentang Sriwijaya dengan merunut jejak-jejak arkeologisnya di masa lalu secara lebih kritis dan akurat, di antaranya lihat dalam Slamet Mulyana, *Sriwijaya*, yang edisi terbarunya diterbitkan oleh penerbit LKiS Yogyakarta yang dicetak pertama kali tahun 2006 dan sekarang sudah mengalami minimal 4 kali cetak ulang.

<sup>12</sup> O. W. Wolters, *Early Indonesia Commerce of The Origins of Srivijaya*, Terjemahan yang Disahkan oleh Penerbit Asli Cornell University, (Jakarta: Komunitas Bambu, 2011), h. 283

menjadi penting, tidak lagi semata-mata barang pengganti dari barang hasil Asia Barat. Hal ini menurut Wolters kemungkinan disebabkan karena sementara waktu tidak terdapat satupun kerajaan yang mampu memegang monopoli perdagangan dengan Cina.<sup>13</sup> Sementara itu pada sisi lain, pesatnya perdagangan yang hebat di Nusantara bagian Barat sepanjang pertengahan pertama abad ke-7, bukan semata-mata disebabkan para penghasil produk lokal mendapatkan kesempatan pasar yang luar biasa, tetapi juga pasti terdapat keuntungan-keuntungan lain yang didapat dari perdagangan transit terkait barang-barang dari Samudera Hindia.<sup>14</sup>

Dengan demikian, tidak diragukan lagi bahwa ekonomi-perdagangan di Nusantara (sekarang menjadi Melayu Nusantara) sudah mengalami perkembangan cukup pesat pada masa itu. Kekuatan yang besar yang dimiliki Sriwijaya ketika itu tentara dengan kapal-kapalnya, digunakan raja memperkuat angkatan lautnya dan untuk mempertahankan perdagangannya. Sama halnya dengan Portugis, 800 tahun kemudian kemudian, raja-raja atau penguasa Sriwijaya hanya berminat menduduki wilayah yang strategis di jalur-jalur perdagangan utama. Artinya, tujuan mengirim angkatan laut untuk melawan Kedah dan pelabuhan saingannya yang lain oleh Sriwijaya bukan diutamakan untuk memenangkan daerah taklukan yang besar.

---

<sup>13</sup> Kunjungan seorang utusan Cina ke Sriwijaya pada 683 M dapat dianggap sebagai pertanda bahwa suatu hubungan resmi antara antara kerajaan itu dengan Cina telah dimulai. setelah itu, utusan pun mulai dikirimkan pada 702, 716, 728 dan 742. Kemudian terhenti dari 742 sampai dengan 904 M. Penyebab berhentinya utusan ini tidak begitu jelas. Ada yang menduga bahwa berhentinya pengiriman utusan itu disebabkan dua kemungkinan. Pertama, disebabkan krena terjadinya pergolakan di Cina, hingga dinasti T'sang Menjadi lemah. Kedua, mungkin juga karena hubungan perdagangan antara Sriwijaya dan Cina telah begitu erat dan kokoh, sehingga tidak diperlukan lagi dukungan diplomatic. Lebih jelas lihat *Ibid.*, h. 285

<sup>14</sup> Pada abad yang sama terdapat dalam referensi Cina tentang lada asing dan perdagangan lada India dengan Cina. Peningkatan penggunaan lada hitam di Cina disebabkan pesatnya perdagangan lada kemukus liar di Nusantara, yang dianggapi oleh Cina sama dengan lada hitam. lihat *Ibid.*



Yang menurut Paul Michel Munoz, “si penguasa tetap didudukkan sebagai pimpinan sebuah pemerintah yang secara ekonomi bersifat otonom”.<sup>15</sup>

Sehingganya wilayah taklukkan yang ada sangat mungkin mempunyai hubungan yang longgar dengan penguasa daerah yang ditaklukkan, mungkin sebagian wilayah menyatakan setia di Palembang adalah wilayah-wilayah naungan taklukkannya yang kemudian diharuskan beroperasi di Palembang. Raja Sriwijaya lebih menekankan pada mereka agar kapal-kapal menuju Cina dan yang datang dari Cina diarahkan untuk singgah di pantai yang menjadi tumpuan itu, dan melakukan sebagian besar urusannya di sana. Aturan ini menurut O. W. Wolters, pada awalnya hanya berlaku untuk pelayaran Nusantara, namun kemudian akhirnya semua pelayaran asing juga diwajibkan.<sup>16</sup>

Dominasi Ekonomi perdagangan Sriwijaya terus berlangsung di Nusantara, namun kemudian mengalami perubahan memasuki akhir abad ke-10 permulaan abad ke-11, dimana Sriwijaya memasuki situasi yang cukup genting. Pada sekitar tahun 992 M kerajaan ini diserang oleh orang Jawa. Salah satu sebab utamanya adalah karena orang Jawa mulai membenci monopoli perdagangan Sriwijaya. Ancaman itu sementara dapat dihentikan, ketika Sriwijaya dapat menghancurkan keraton Jawa Timur tahun 1016 M. Walaupun demikian, Jawa mulai menunjukkan sebagai sebuah wilayah perdagangan yang penting, karena wilayah itu jauh lebih kaya dari Sriwijaya. Konsekuensi logis dari hal itu, kedudukan ekonomi, terutama perdagangan, Sriwijaya menjadi mulai lemah. Sekitar selama dua abad setelah itu, wilayah-wilayah naungan Sriwijaya perlahan-lahan mulai menentang monopoli pantai, dan lebih lanjut mendorong para saudagar asing

---

<sup>15</sup> Paul Michel Munoz, *Early Kingdoms of The Indonesian Archipelago and The Malay Peninsula*, Terj. Tim Media Abadi, (Yogyakarta: Media Abadi, 2013), h. 161

<sup>16</sup> O. W. Wolters, *op.cit.* , h. 293

mengunjungi pelabuhan-pelabuhan mereka sendiri. Ditambah lagi pada abad ke-12, karena sistem perdagangan Cina terombang-ambing, para saudagar Cina turut mengganggu monopoli Sriwijaya dengan berdagang dimana saja sesuka mereka. Sungguhpun demikian, namun satu hal menurut Paul Michel Munoz, penyebab utama kehancuran (keruntuhan) Sriwijaya adalah "... Pastilah karena ketidakmampuan para Maharajanya untuk menyesuaikan diri dengan pasar baru yang terbuka dan kompetitif. Nasib dari semua Negara di dunia berada pada kemampuan pimpinannya menghadapi tantangan internal maupun eksternal... adanya para pemimpin yang terbukti tidak mampu untuk menemukan solusi dalam menghadapi dunia yang berubah".<sup>17</sup> Dengan demikian, pada akhir abad ke-13, Sriwijaya tidak lagi menjadi kerajaan yang luas. Begitu juga dengan ekonomi, ia tidak lagi menjadi pusat perdagangan yang penting, kajian yang mendalam untuk sebab-sebabnya ini perlu dilakukan lebih jauh. Namun, satu yang hampir bisa diduga secara pasti dari perspektif sejarah ini diketahui bahwa sistem ekonomi-perdagangan yang ada pada masa itu selalu berpusat pada lingkaran istana sebagai penguasa.

## 2. Dinamika Ekonomi-Perdagangan *Hulu Hilir* Dunia Melayu

Dengan berakhirnya monopoli perdagangan Sriwijaya masa lalu yang kemudian muncul kerajaan Majapahit di Jawa dan Pasai di ujung Sumatera telah melahirkan era baru ekonomi-perdagangan di Nusantara, yang penuh dinamika. Dinamika itu dimulai, ketika munculnya fenomena menarik pasca kehadiran Portugis ke Dunia Melayu Nusantara dekade awal abad ke-16, kemudian disusul oleh bangsa Eropa lainnya terutama Belanda dan Inggris. Fenomena tersebut di antaranya adalah terajadinya perubahan besar konstelasi politik, ekonomi, sosial-budaya, bahkan agama di kawasan ini. Ambisi mereka untuk menguasai perdagangan dan pada batas tertentu agama (Katolik) telah

---

<sup>17</sup> Paul Michel Munoz, *op. cit.*, h. 164

mengganggu para penguasa dan pelaku ekonomi lokal, terutama ketika Islam sedang melakukan konsolidasi di tengah-tengah masyarakat. Pada saat bersamaan, penguasa juga telah mengadopsi Islam sebagai agama resmi.

Portugis pada dasarnya mengadopsi kalaulah tidak ingin mengatakan mengikuti dan menjiplak pola administrasi pelabuhan yang telah ada. Mereka mengakui kerapian sistem pelabuhan kesultanan Malaka. Mengikuti sistem dilakukan Malaka sebelumnya, jabatan bendahara masih tetap dipertahankan. Pejabat ini memiliki otoritas mengatur perdagangan dengan semua pedagang non Kristen dan asing.<sup>18</sup> Temenggung memiliki tanggungjawab atas semua kapal yang berasal dari Minangkabau dan Melayu di Kawasan Naning dan Ringgy. Posisi Syahbandar juga dipertahankan dengan sebagai penanggungjawab pengelolaan pajak dan kapal asing di samping sebagai penerima tamu-tamu asing, sekaligus sebagai asisten Bendahara. Dalam konteks ini, barangkali benar apa yang dikatakan van Leur bahwa pada masa “rezim kolonial Portugal tidak memperkenalkan ekonomi baru dalam perdagangan Asia Tenggara”<sup>19</sup> (baca: Dunia Melayu).

Kekuasaan Portugis di Malaka berakhir pada 14 Januari 1641, ketika serangan dari Belanda tidak mampu lagi mereka tahan. Namun, perlu dipahami bahwa kehancuran Portugis di Melaka, bukan semata disebabkan karena serangan Belanda saja, tetapi banyak faktor yang perlu dipertimbangan. *Pertama*, patut diduga bahwa Portugis gagal memenangkan persaingan bisnis (ekonomi) dagang di Malaka. Aktivitas dagang mereka di kawasan ini dimonopoli oleh kelompok hirarkis yang merupakan pengontrol Malaka sesungguhnya. *Kedua*, tindakan korupsi yang mengakibatkan aktivitas perdagangan menurun secara signifikan. *Ketiga*, beberapa kekeliruan kebijakan yang dilakukan di antaranya sikap diskriminatif, misalnya pajak yang

---

<sup>18</sup> F. J. A. Morhead, *A History of Malaya and Her Neighbors*, (Kuala Lumpur: Longmans of Malaysia, 1961), Vol. 1, h. 184

<sup>19</sup> J. C. Van Leur, *op. cit.*, h. 175

tinggi diberlakukan terhadap barang yang berasal dari Pegu, Sumatera, Singapura dan Sabah, termasuk kepada semua pajak yang masuk dari Asia Selatan kecuali Bengal. Ini berakibat pada penurunan secara drastis para pedagang yang datang ke *entrepot* tersebut. Dan yang *keempat* yang perlu ditambahkan adalah karena adanya boikot dari Jawa, sebagai pemasok utama beras kota ini, ditambah adanya blokade militer dan ekonomi yang dilakukan kerajaan lain di Nusantara.<sup>20</sup>

Pasca Portugis kalah maka dinamika ekonomi perdagangan semakin kompleks. Apalagi ketika itu Islam semakin kokohnya sebagai agama masyarakat Melayu Nusantara. Kokohnya Islam sebagai agama ditandai dengan munculnya kerajaan di Nusantara yang Islam. Kesultanan Palembang misalnya, adalah salah satu contoh yang menarik untuk kasus tersebut, apalagi kalau dikaitkan dengan pola pembagian *hulu* dan *hilir*. Kesultanan Palembang dianggap memiliki berbagai hak mencakup kemampuan mengendalikan dan mengorganisasikan segala sumber daya kekuasaan, baik yang terkait politik apalagi ekonomi (perdagangan). Sistem ketatanegaraan yang berlangsung di Kesultanan merupakan sarana yang efektif sekaligus sangat khas. Dalam hal perdagangan, Tomi Pires menggambarkan bahwa Palembang telah melakukan perdagangan di Malaka, dan melakukan jual beli dengan jumlah yang besar dengan Pahang.<sup>21</sup>

Khusus dalam hal kekuasaan, Kesultanan Palembang menerapkan kekuasaan yang berbeda antara *hulu* dan *hilir*. Di kawasan *hulu*, sultan dan pembesar kerajaan tidak memiliki otoritas dalam menerapkan, apalagi memaksakan berbagai pungutan pajak beserta merekrut tenaga untuk para pekerja. Berbeda dengan *hulu*, di kawasan *hilir* sultan dan pembesar kerajaan mempunyai otoritas dalam menerapkan, bahkan memaksakan berbagai pungutan pajak beserta merekrut tenaga

---

<sup>20</sup> Lihat Amirul Hadi, *Aceh Sejarah, Budaya, dan Tradisi*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010), h. 9-11

<sup>21</sup> Tomi Pires, *op.cit.*, h. 205

kerja. Mereka juga mempunyai semacam *privilege* khusus, misalnya mereka berhak menguasai hasil-hasil perdagangan yang dimonopoli mereka.

Orientasi perdagangan sebagai bagian sistem ekonomi, lebih terlihat dan dijumpai pada masyarakat di kawasan *hilir*. Masyarakat *hilir* sudah lama terikat dengan dunia perdagangan bisa diteselusuri minimal sejak kerajaan Sriwijaya, yang pusatnya adalah di Kota Palembang. Sungai-sungai yang ada di Palembang selain berfungsi sebagai sarana penghubung antara *hulu* dan *hilir*, juga menjadi sumber kehidupan pokok bagi masyarakat setempat. Sehingga dalam konteks ini sungai sesungguhnya sudah turut memberikan pengaruh dalam membentuk pola pikir serta “pandangan dunianya”. Pada sisi lain, Kota Palembang sebagai pusat kerajaan sekaligus bandar pelabuhan berperan menghubungkan berbagai kawasan dan menjadi tempat tinggal berbagai macam kelompok etnis. Karakteristik ini sekaligus juga membedakan dengan kawasan *hulu*. Penguasa dari pusat pemerintahan seperti sultan dan pembesar istana masuk dalam kelompok priyayi (istilah C. Grezt) yang menempati posisi puncak piramida. Mereka memakai gelar-gelar bangsawan yang mirip dengan di Jawa. Gelar-gelar tersebut semula diperoleh berdasarkan kelahiran, namun kemudian Sultan mengambil alih pemberian gelar itu. Sultan sering memberikan hadiah berupa gelar dan jabatan *jenang* atau *raban* kepada *Pasirah* atau orang yang dipercayainya. Sultan juga memberikan dusun-dusun tertentu dan hak-hak istimewa kepada mereka. Mereka diberi hak memungut pajak dan menarik berbagai keperluan bahan pangan, kayu bakar, dan tenaga kerja. Sementara kelompok priyayi yang tidak memiliki dusun, berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya melakukan kerja tukang serta menjadi pengrajin emas dan perak. Dengan demikian terlihat bahwa pusat kekuasaan ekonomi itu tersimpul semuanya pada penguasa.

Kondisi ini barangkali, salah satu yang disitir Brnard H. M. Vlekke, bahwa Belanda hanya membatasi kegiatan mereka

di Sumatera, hanya pada hubungan dagang reguler, terutama dengan Kesultanan Jambi dan Palembang. “Di kedua kerajaan itu perdagangan mereka terutama bergantung pada kehendak baik dari penguasa setempat”.<sup>22</sup> Dalam konteks ini menarik apa yang dikemukakan J. W. van Royen sebagaimana dikutip Supriyanto<sup>23</sup> bahwa pada masa kekuasaan Sultan Mahmud Badaruddin sampai akhir kekuasaan Kesultanan Palembang memiliki pola yang sama, yaitu monopoli dikuasai oleh Sultan. Sedangkan pada masa Sultan Muhammad Badaruddin mulai diadakan pembagian tugas secara jelas dan sistematis. Pemerintahan Kesultanan diatur secara baik dan dibantu oleh aparaturnya keamanan. Di samping itu juga telah muncul peraturan-peraturan bagi para pedagang atau pendatang.

Salah satu sumber ekonomi yang penting dalam perdagangan di Sumatera adalah lada (*merica/piper nigrum*). Lada menduduki posisi utama dan menjadi komunitas penting serta terbesar di Sumatera. Dunia internasional mengenal daerah yang paling terkenal untuk ekspor lada adalah Sumatera.<sup>24</sup> Lada pada awalnya merupakan perdagangan utama yang dimonopoli langsung oleh *East India Company* (EIC), dan pedagang yang bernaung di bawahnya bebas memperdagangkan komoditas lainnya. Khusus dalam konteks *hulu-hilir*, lada merupakan semacam sumber ketegangan tersendiri dalam sistem perdagangan mereka. Pada permulaan abad ke-17, pasar internasional lada semakin meluas. Tinggi harga pada masa ini menunjukkan bahwa permintaan pasar dunia tidak terpenuhi. Fenomena ini pada gilirannya mendorong meluasnya kawasan penghasil lada ke Batang hari Jambi, melalui Tembesi ke

---

<sup>22</sup> Bernard H. M. Vlekke, *Nusantara: A History of Indonesia*, Terj. Samsudin Berlian, (Jakarta: Gramedia, 2006), h. 116

<sup>23</sup> Supriyanto, *Pelayaran dan Perdagangan di Pelabuhan Palembang 1824-1864*, (Yogyakarta: Ombak, 2013), h. 49

<sup>24</sup> Barbara W. Andaya, “Women and Economic Change: The Pepper Trade in Pre-Modern Southeast Asia” dalam *Journal of The Economic and Social History of The Orient*, Vol. 38, No. 2, Women History (1995) h. 165-190

Merangin dan ke atas menuju dataran tinggi Palembang. Dalam konteks ini patut diduga bahwa pada masa itu banyak permintaan dari penguasa pemerintahan atau pangeran diberbagai wilayah Sumatera kepada Inggris untuk membangun pemukiman di wilayah masing-masing supaya mendorong pendirian pabrik-pabrik dan kelancaran perdagangan yang lebih permanen yang sebelumnya sangat tidak menentu, karena ketergantungan terhadap keberhasilan pelayaran menuju pantai yang dilakukan sesekali saja.<sup>25</sup>

Pada awalnya harga lada cukup bagus atau tinggi, namun kemudian selama bertahun-tahun, harga yang dibayarkan kepada petani terhadap hasil produksi lada adalah sebesar 10 dolar Spanyol atau 50 *shilling* untuk tiap baharnya, yang beratnya mencapai 500 atau bisa dikatakan 560 Pon.<sup>26</sup> Sekitar tahun 1780, untuk mendorong dan meningkatkan investasi, harga dinaikkan menjadi 15 dolar. Biaya ini akan ditambahkan pada upeti, yang jumlahnya bervariasi setiap daerah sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian, yang rata-rata setengah dolar sampai satu dolar setiap baharnya.<sup>27</sup> Harga yang ditetapkan ini cukup rendah pada masa itu. Harga rendah ini, pada dasarnya telah membuat para penduduk lokal yang mengolah perkebunan mendapatkan hasil yang sangat minim, dan tentu merugikan. Konsekuensi logisnya lebih lanjut tentu, kecilnya penghasilan akan membuat sifat malas dan menurunnya semangat para penduduk lokal dalam melakukan bisnis perkebunan ladaini perlu kajian lebih lanjut lagi.

Dalam konteks ekonomi perdagangan *hulu-hilir*, sebagaimana disinggung di atas, perdagangan lada telah memicu

---

<sup>25</sup> William Marsden, *The History of Sumatera*, Terj. Sutrisno (Yogyakarta; Indoliterasi, 2016), h. 192

<sup>26</sup> *Ibid.*, h. 193

<sup>27</sup> Untuk mengikat kepala pemerintahan, Inggris membuat semacam kontrak perjanjian yang isinya antara lain adalah memberikan hak pembelian eksklusif kepada Inggris, dan sebagai imbalannya mereka para kepala pemerintahan memperoleh pendapata atau upeti dari produksi di wilayah masing-masing. Lihat *ibid.*

ketegangan tersendiri. Tetutama, ketika meluasnya ekonomi uang telah memunculkan ketegangan lebih lanjut dalam hubungan *hulu-hilir*, karena keraguan tentang nilai koin dan kekhawatiran orang pedalaman (*hulu*), bahwasanya mereka mungkin menjadi target penipuan *hilir*. Dalam transaksi antara para agen dari *hilir* dan para pelanggan dari *hulu*, kecurigaan lain menyangkut perkara takaran yang selalu menjadi masalah sensitif dalam perdagangan, karena tidak adanya standarisasi berat koin di masing-masing daerah. Selain itu, takaran dapat dengan mudahnya disesuaikan dengan kondisi tertentu, misalnya ketika kelangkaan terjadi.

Ketegangan antara *hulu hilir* dalam ekonomi dan perdagangan ini semakin diperparah dengan perilaku orang-orang Eropa yang senang berpiutang dan kesediaan mereka untuk memberikan pinjaman dalam bentuk barang atau uang. Dalam konteks ini menurut B. W. Andaya,<sup>28</sup> sangat mungkin bagi seseorang pembeli untuk menyimpan cadangan panen hingga musim panen berikutnya dengan mengeluarkan barang atau secara kredit dimuka dengan asumsi bahwa pengiriman lada akan segera menyusul. Belanda dan Inggris berdagang dengan menggunakan model kredit itu. Dengan demikian, para produsen di *hulu* membeli sejumlah besar barang atau kain, dan sebagai gantinya, mereka menjanjikan pengiriman lada kepada Belanda dan Inggris. Namun, karena musim buruk, penyakit dan lainnya, para peodusen di *hulu* tidak bisa membayar pinjaman dengan pengiriman lada. Dalam perspektif inilah menurut Schama dikutip Andaya bahwa “orang-orang Melayu tidak punya malu dalam berhutang atau melupakan hutang-hutang mereka”.<sup>29</sup>

Pada sisi lain persoalan hutang telah memunculkan masalah antara kesultanan/istana dengan orang-orang Eropa. Pada tahun 1791 residen VOC menuntut pelunasan atas pinjaman yang diberikannya kepada seorang penguasa

---

<sup>28</sup> Barbara W. Andaya, *op. cit.*, h.

<sup>29</sup> *Ibid.*



Palembang selama konflik 1722 dan 1731. Raja-raja Jambi dan Palembang tahu betul bahwa orang-orang Eropa hanya menerima pelunasan hutang dalam bentuk aset moneter. Artinya, cara lain seperti menganugerahkan kehormatan, adopsi sebagai putra raja, pemberian hadiah berupa perempuan, tidaklah akan melunasi hutang. Desakan orang-orang Eropa agar hutang harus dilunasi dilunasi dalam bentuk barang yang dapat dijual kembali membuat para bangsawan dan elite istana merasa tertekan.<sup>30</sup>

Pada masa itu penguasa Jambi dan Palembang lebih mirip “sebagai penagih hutang”, karena Belanda dan Inggris terus-menerusnya menekan mereka untuk membayar hutang. Otoritas keagamaanpun mulai dilibatkan untuk membujuk para produsen lada melunasi hutang-hutangnya.<sup>31</sup> Meskipun

---

<sup>30</sup> Pada 1623 terdapat berbagai keluhan yang menyatakan bahwa pangeran Jambi dan bangsawan istana memiliki hutang yang banyak kepada VOC. Jumlah keseluruhan berjumlah 5.603 *Real*. Dua puluh tahun kemudian hutang istna Jambi kepada Belanda tercatat 10.000 *Real*. Orang-orang Inggris juga gelisah akan daftar piutangnya yang jumlahnya besar. Piutang yang besar ini terutama diakibatkan oleh adanya perdangan lada pada abad ke-17 yang mendorong orang-orang kaya dan bangsawan memberikan pinjaman. Untuk menyelesaikan berbagai hutang tersebut Eropa dan para sultan membuat berbagai kontrak perjanjian. Pada tahun 1642, dalam perjanjian antara Belanda dan Palembang, Pangeran sepakat untuk mencerikan pada para kawulanya bahwa mereka tidak memperoleh koin-koin tembaga kecil kain secara kredit sampai merek memenuhi kewajiban mereka sebelumnya, yaitu mengirimkan lada ke Belanda. Siapapun orang yang berhutang uang “dapat ditangkap dan dibawa ke Batavia, dan raja tidak akan menghentikan hal ini, terlepas apakah ia rakyatnya, ratunya, ataupun salah seorang dari bangsawan istana”. Perjanjian lain di Tahun berikutnya di Jambi diharuskan raja untuk *memaksa* mereka yang berhutang pada VOC agar membayar hutang-hutang mereka dan sang raja juga harus membolehkan Residen Belanda di hulu untuk menagih hutang. Pada tahun 1648, setelah “melontarkan kata-kata keras”, penguasa Jambi akhirnya setuju untuk menyita harta. Raja juga dapat menyita harta para bangsawan yang hutangnya kepada Belanda sangat banyak jumlahnya. Lihat *Ibid*.

<sup>31</sup> Di Jambi, seorang pedagang yang berasal dari Pahang yang dilantik sebagai Tuan Kadhi (hakim agama), diberi kuasa untuk menagih hutang atas nama raja dan para bangsawan lainnya. Pada 1691, ketika

ketegangan antara *hulu* dan *hilir* semakin meningkat raja Palembang maupun Jambi harus tetap mempertahankan atau memperluas kuasa mereka atas penduduk *hulu*, karena bagi mereka penduduk *hulu* ini begitu penting sebagai sumber ekonomi (mendapatkan penghasilan) bagi kerajaan.

Pembahasan mengenai dinamika ekonomi-perdagangan di Palembang khususnya, memang cukup kompleks. Pergeseran pusat-pusat kekuasaan di luar, langsung ataupun tidak langsung telah turut mempengaruhi arti strategis daerah Palembang. Ia pernah menjadi semacam daerah yang diperebutkan antara Inggris dan Belanda saat kerajaan Islam Malaka jatuh ke Tangan Portugis. Inggris dan Belanda berusaha keras menanamkan pengaruh di daerah Palembang yang cukup strategis itu agar dapat menguasai jalur perniagaan, termasuk monopoli perdagangan timah di Bangka, apalagi komoditas lada. Ini terus berlanjut, peran Palembang semakin diperhitungkan dalam konstelasi ekonomi perdagangan, termasuk politik.

#### **D. Penutup**

Dari uraian di atas, ada beberapa hal bisa ditegaskan di sini. *Pertama*, bahwa dinamika ekonomi-perdagangan di dunia Melayu Sumatera belum secara komprehensif bisa diuraikan dengan mengikuti pola *hulu* dan *hilir*. Dalam tulisan ini memang diakui minim perspektif, dan belum banyak aspek yang dibahas, misalnya bagaimana perdagangan budak berlangsung dalam melanggengkan pembudidayaan lada, bagaimana para bangsa Eropa dan Cina meraup keuntungan dari berbagai perdagangan yang ada, dan lainnya. *Kedua*, bagaimanapun juga pola pembagian *hulu-hilir* secara langsung atau tidak telah memperlihatkan sebuah varian-varian dengan karakteristik tersendiri, dalam membangun tatanan dan sistem ekonomi-perdagangan di dunia Melayu.

---

penguasa Palembang berada di hulu untuk menagih hutang, dia juga disertai oleh kepala imam. lihat *ibid*.

**DAFTAR KEPUSTAKAAN**

- Andaya, Barbara Watson, *To Live as Brothers: Southeast Sumatera in Seventeenth and Eighteenth Centuries*, Terj. Septian Dhaniar Rahman dan Aditya Pratama, Yogyakarta: Ombak, 2016
- \_\_\_\_\_, “Women and Economic Change: The Pepper Trade in Pre-Modern Southeast Asia” dalam *Journal of The Economic and Social History of The Orient*, Vol. 38, No. 2, Women History, 1995
- Hadi, Amirul, *Aceh Sejarah, Budaya, dan Tradisi*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010
- Hidayat, Rian, “Perubahan Sosial Anak Dalam Batin Sembilan di Batin Bahar, di Kabupaten Batang Hari dan Muaro Jambi”, dalam *Proceeding The First Internasional Conference On The Jambi Studies: History, Art and Culture, Social and Religion Change*, Jambi, November 21-23, 2013, h. 473-493
- Leur, J. C. Van, *Indonesia Trade and Society: Essays in Asian Social and Economic History*, Terj. Abmi Handayani, et. al., Yogyakarta: Ombak, 2015
- Marsden, William, *The History of Sumatera*, Terj. Sutrisno, Yogyakarta; Indoliterasi, 2016
- Morhead, F. J. A., *A History of Malaya and Her Neighbors*, Kuala Lumpur: Longmans of Malaysia, 1961
- Munoz, Paul Michel, *Early Kingdoms of The Indonesian Archipelago and The Malay Peninsula*, Terj. Tim Media Abadi, Yogyakarta: Media Abadi, 2013
- Mulyana, Slamet, *Sriwijaya*, Yogyakarta: LKiS , 2006

- Pires, Tomi, *The Suma Oriental of Tome Pires An Account of The East, From The Sea to Cina and The Book of Francisco Rodrigues*, Terj. Andrian Perkasa dan Anggita Pramesti, Yogyakarta: Ombak, 2016
- Supriyanto, *Pelayaran dan Perdagangan di Pelabuhan Palembang 1824-1864*, Yogyakarta: Ombak, 2013
- Vlekke, Bernard H. M., *Nusantara: A History of Indonesia*, Terj. Samsudin Berlian, Jakarta: Gramedia, 2006
- Wolters, O. W., *Early Indonesia Commerce of The Origins of Srivijaya*, Terjemahan yang Disahkan oleh Penerbit Asli Cornel University, Jakarta: Komunitas Bambu, 2011
- Zed, Mestika, *Kepialangan Politik dan Revolusi Palembang 1900-1950*, Jakarta: LP3ES, 2003